

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada undang-undang No. 32 dan 33 tahun 2004 dimana terdapat prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan pendidikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan kebijakan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan masyarakat agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Salah satu model pengelolaan pendidikan yang berbasis otonomi dan kemandirian sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pasal 51 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah” (Depdiknas RI, 2003 : 45).

MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis otonomi atas kemandirian sekolah dan pemerintah daerah dalam menentukan arah, kebijakan serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. MBS bertujuan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, bertujuan pula untuk mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan *stake-holder* pendidikan di sekolah, sehingga tercipta *sense of belonging* (rasa memiliki) dari mereka. Dalam konsep MBS, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan dihimpun dalam satu wadah organisasi yang dinamakan komite sekolah.

Komite sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu:

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam rangka pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, pendidikan jalur sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah merupakan *partner* sekolah yang bertugas untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun peran komite sekolah dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, terbagi menjadi empat peranan yaitu sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*).

Dalam situasi sekarang ini, peranan tersebut sangat diperlukan sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Peraturan tersebut menjadi lebih jelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan dimana pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan, serta dilarang memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah menjadi sangat penting dengan hadirnya berbagai peraturan tersebut. Pencapaian mutu pendidikan dengan sumber pendanaan pendidikan yang minim dapat terwujud yakni salah satunya melalui pemberdayaan komite sekolah dalam membantu mengupayakan dan

meningkatkan pendapatan (*income generating*) sekolah untuk mendukung terselenggaranya kegiatan siswa yang sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan.

*Income generating* sekolah pada dasarnya merupakan suatu istilah yang diartikan sebagai peningkatan pendapatan sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009:67) menyatakan:

*Income generating activity* merupakan kegiatan komersial yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui usaha di dalam sekolah/PT (*enterpreneurship*) maupun usaha komersial diluar sekolah/PT yang dikelola secara profesional (*interpreneurship*) dan sekolah/PT hanya sebagai pemilik atau pemegang saham. Bisa juga sekolah/PT melakukan usaha komersial terpisah di luar sekolah/PT yang dikelola oleh warga/almamater sekolah/PT.

Berdasarkan uraian tersebut, melalui berbagai kegiatan komersial komite sekolah dapat membantu sekolah dalam menghimpun dan meningkatkan pendapatan sekolah untuk mendukung berjalannya proses belajar mengajar sehingga memacu peningkatan mutu pendidikan disatuan pendidikan.

Menurut Garmawandi (2012:10) mengungkapkan bahwa:

Komite sekolah sebagai stakeholder dan mitra sekolah harus mulai peka dan peduli dengan segala kekurangan yang ada disekolah, khususnya sumber pendanaan pendidikan yang minim dalam upaya membangun sekolah sebagai bentuk upaya peningkatan mutu sekolah secara *competitiev advanted* dan *competitiev comparable*.

Komite sekolah harus berupaya untuk membantu sekolah dalam penggalangan dana masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat, dilakukan secara kemandirian, kerjasama, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Dalam penelitian ini, *income generating* sekolah diartikan sebagai peningkatan pendapatan sekolah baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat maupun berbagai sumbangan yang sifatnya insidental, dikelola bersama komite sekolah melalui proses *budgetting*, *accounting* dan *auditing*

serta dialokasikan untuk berbagai keperluan sekolah. Bray dalam Garmawandi (2012:9) mengungkapkan bahwa:

Pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan alokasi belanja untuk pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan disetiap jenis sekolah.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada seluruh SD negeri di kecamatan Sumur Bandung menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa komite sekolah yang belum menjalankan seluruh perannya secara optimal. Pada umumnya, peran komite sekolah yang lebih dominan dijalankan adalah peran sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*). Menurut beberapa sumber, faktor kesibukan dan pekerjaan lain diluar tugas sebagai komite sekolah menjadi alasan utama belum terlaksananya peran komite sekolah secara optimal disamping faktor kepribadian dari komite sekolah sendiri.

Meskipun demikian, masih terdapat komite sekolah yang dinilai sudah cukup optimal dalam menjalankan peranannya yakni salah satunya SD Negeri Banjarsari. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kontribusi peran komite sekolah terhadap *income generating* sekolah sejauh ini dinilai sudah berlangsung secara optimal. Adapun kontribusi peran komite sekolah khususnya dalam usaha mendapatkan dan meningkatkan sumber biaya atau dana sekolah dari pemerintah, saat ini komite sekolah hanya berperan sebagai badan pendukung, badan pengontrol dan badan mediator. Hal ini dikarenakan seluruh sumber dana dari pemerintah sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kontribusi peran komite sekolah di SD Banjarsari menjadi dominan dalam usaha mengatasi minimnya sumber pendanaan dari pemerintah. Usaha yang dilaksanakan komite sekolah diantaranya dengan mengadakan kerja sama dengan berbagai perusahaan seperti bank, Perusahaan Listrik Negara, perusahaan motor, perusahaan mobil, pemerintah kota, PT Telkom, dan sebagainya.

Didukung oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua siswa yang pada umumnya bekerja pada perusahaan-perusahaan dan instansi besar, memudahkan komite sekolah untuk mencari bantuan dana dalam mendukung kelancaran kegiatan siswa terutama untuk kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai perlombaan.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian. Memperhatikan kondisi tersebut maka penelitian ini memfokuskan pembahasannya mengenai “kontribusi peran komite sekolah terhadap *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung”.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap masalah yang diteliti, maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah.

Purwanto (2004:7) menyatakan bahwa “rumusan masalah merupakan pokok permasalahan yang menjadi inti dalam penelitian”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “apakah peran komite sekolah mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung?”.

Secara lebih rinci permasalahan pada penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung?
2. Bagaimana gambaran *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung?
3. Seberapa besar kontribusi peran komite sekolah terhadap *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada dasarnya adalah pedoman atau arahan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan hal ini, Suharsimi Arikunto (2010:97) menyatakan bahwa “tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang peran komite sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung.
2. Untuk mengetahui tentang *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi peran komite sekolah terhadap *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kontribusi peran komite sekolah terhadap *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Segi Teori
 

Dari segi teori diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tentang pengembangan konsep keilmuan Administrasi Pendidikan, khususnya mengenai kontribusi peran komite sekolah terhadap *income generating* sekolah.
2. Segi Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk peningkatan peran komite sekolah secara khusus.
  - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan

meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan sebagai bahan evaluasi diri.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan alat yang diharapkan dapat mengungkapkan masalah faktual dan aktual tentang komite sekolah dan *income generating* sekolah pada SD Negeri di kecamatan Sumur Bandung.

### **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi berisi tentang rincian urutan penulisan dari setiap bab dalam skripsi ini. Adapun struktur organisasi skripsi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Struktur Organisasi Skripsi

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

- A. Kajian Pustaka
- B. Kerangka Pemikiran
- C. Hipotesis Penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Instrumen Penelitian
- F. Proses Pengembangan Instrumen
- G. Teknik Pengumpulan Data

#### H. Analisis Data

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

#### B. Pembahasan

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I skripsi berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II skripsi berisi kajian pustaka yang menguraikan teori-teori/ konsep-konsep/ hukum-hukum/ model-model dan turunannya dalam bidang yang dikaji; penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya; serta posisi teoritik penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yang diturunkan dalam subjudul “Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian”.
3. Bab III skripsi berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen berikut: lokasi, populasi, dan sampel; desain penelitian; metode penelitian; definisi operasional; instrumen penelitian; proses pengembangan instrumen; teknik pengumpulan data; dan analisis data, yang menguraikan secara terperinci tahap analisis data.
4. Bab IV skripsi berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari dua hal, yaitu: pengolahan/ analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan

atau analisis temuan, yang mendiskusikan temuan tersebut dikaitkan dengan dasar teoritik yang telah dibahas dalam bab kajian pustaka dan temuan sebelumnya.

5. Bab V skripsi merupakan bagian akhir dari skripsi, yang berisi tentang uraian kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.

